



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

**LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)**

**LAKIP TAHUN 2021
TERHADAP PENILAIAN
KINERJA DINAS SOSIAL
PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
TAHUN ANGGARAN 2020**

Alamat : Jln, Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemda Kab. Mukomuko

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko tahun 2020 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko. Hasil pengukuran kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko ini diharapkan dapat digunakan dalam mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan program kerja serta kegiatan selama tahun 2020. Disamping itu, laporan ini juga berfungsi sebagai sarana bagi Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko dalam rangka kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders sesuai Peraturan Menpan dan Refomasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, juga sebagai sarana evaluasi mandiri (self evaluation) atas pencapaian Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko dalam upaya penyempurnaan kinerja, terutamat dalam hal dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan serta kebijakan kegiatan di tahun mendatang. Kami berharap penyusunan LAKIP ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja.

Kami berharap penyusunan LAKIP ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang.

Mukomuko, Januari 2021
KEPALA DINAS,



SARONI, SH
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19641215 198903 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PANDAHULUAN	2
A Latar Belakang	2
B Gambaran Pelayanan Dinas Sosial	3
1.1 Kondisi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	3
1.2 Kondisi Umum Bantuan dan Jaminan Sosial	5
1.3 Kondisi Umum Pemberdayaan Sosial	7
C Maksud dan Tujuan	10
D Gambaran Umum	10
1.1 Organisasi Perangkat Daerah	10
1.2 Sumber Daya Manusia	11
1.3 Sumber Daya Aparatur	11
1.4 Sumber Pendanaan dan Struktur Belanja	12
1.5 Sistematisasi Penyajian	12
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	14
A Rencana Strategis	14
1 Visi dan Misi	15
2 Tujuan dan Sasaran Strategis	16
3 Program Utama dan Kegiatan Pokok	16
4 Indikator Kinerja Utama	17
B Penetapan Kinerja Tahun 2019	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A Pengukuran Kinerja	21
B Hasil Pengukuran Kinerja	22
C Akuntabilitas Keuangan	22
D Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi ...	24
BAB IV PENUTUP	26
A Beberapa Catatan atas Kinerja Dinas Sosial Tahun Anggaran 2020.....	26
B Upaya Pemecahan Masalah	27



DAFTAR TABEL

1.	TABEL. 1	Struktur Organisasi Dinas Sosial	1
2.	TABEL. 2	Profil Sumber Daya Manusia Dinas Sosial Tahun 2020 Berdasarkan Kepangkatan dan Pendidikan	2
3.	TABEL. 3	Sumber Daya Manusia Berdasarkan Eselon	3
4.	TABEL. 4	Struktur Anggaran Dinas Sosial Tahun 2020	4
5.	TABEL. 5	Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Tahun 2020	5
6.	TABEL. 6	Pengukuran Kinerja Dinas Sosial Tahun 2020	6
7.	TABEL. 7	Evaluasi Analisis Kinerja Tahun 2020	11
8.	TABEL. 8	Pagu dan Realisasi Belanja Tidak Langsung	19
9.	TABEL. 9	Pagu Realisasi Belanja Langsung	20

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam upaya mendorong terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan peraturan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko sebagai salah satu instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor : 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10) dan Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko, yang melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang sosial mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya (hasil pelaksanaan kegiatan di bidang sosial) dalam bentuk Laporan Kinerja (LKJ).

Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial;
- b. penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas bidang sosial;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL

Berikut ini adalah gambaran kondisi umum penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

1.1 Kondisi Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial, dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami difungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.

Sasaran penerima manfaat penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pelayanan dan rehabilitasi sosial adalah PMKS yang masuk ke dalam kategori:

a) Pelayanan Sosial Anak

Anak meliputi balita, anak telantar, anak putus sekolah, anak jalanan, anak nakal, anak cacat, anak yang

diperdagangkan, dan anak dalam situasi darurat (yang memerlukan perlindungan khusus).

Pelayanan kesejahteraan sosial anak yang dilaksanakan Dinas Sosial melalui penyelenggaraan penyantunan, perawatan, perlindungan, pengentasan anak di luar pengasuhan orang tua dan pengangkatan anak. Tujuan dari intervensi sosial yang dilaksanakan melalui pelayanan dan rehabilitasi sosial anak untuk mengembalikan fungsi sosial pengasuhan anak kepada orang tua / keluarga.

b) *Pelayanan Sosial Lanjut Usia*

Berbagai program dan kegiatan terus dikembangkan oleh Dinas Sosial dengan maksud untuk menumbuhkan suasana kehidupan yang mendorong pralanjut usia dan lanjut usia yang dapat melakukan kegiatan sosial keagamaan dan kerohanian selama mungkin di dalam lingkungan keluarga dan komunitas. Dengan demikian, aksesibilitas lanjut usia terhadap sarana dan pelayanan umum diharapkan dapat tersedia dengan semakin aktifnya mereka.

Secara garis besar, pelayanan sosial lanjut usia dilaksanakan melalui dua sistem pelayanan sosial yaitu pelayanan melalui sistem panti sosial dan pelayanan melalui sistem luar panti sosial.

c) *Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat*

Program dan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat diarahkan untuk:

- a) Meningkatkan kesempatan berusaha dan bekerja untuk meningkatkan kualitas hidup dan taraf kesejahteraan sosial penyandang cacat;
- b) Meningkatkan kepedulian sosial masyarakat, memanfaatkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial dan sumber daya ekonomi untuk pengembangan usaha ekonomi produktif dan membangun budaya kewirausahaan bagi penyandang cacat;
- c) Mendapatkan bantuan sosial setiap bulan bagi penyandang cacat berat sesuai kriteria melalui sistem jaminan sosial;
- d) Meningkatkan aksesibilitas fisik penyandang cacat terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, pelayanan kesejahteraan sosial, dan sumber daya ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosialnya;
- e) Meningkatkan aksesibilitas nonfisik penyandang cacat dalam setiap pengambilan keputusan terkait kebijakan publik dan pelayanan sosial sesuai dengan perspektif penyandang cacat.

1.2. Kondisi Umum Bantuan dan Jaminan Sosial

Bantuan dan jaminan sosial merupakan program yang diarahkan untuk memberikan perlindungan sosial kepada penduduk yang membutuhkan pelayanan secara khusus agar terlindungi dari risiko-risiko yang membuat mereka tidak berdaya atau lebih miskin dari kondisi sebelumnya. Untuk memberikan perlindungan kepada kelompok berisiko dan rentan tersebut, diperlukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bidang bantuan dan jaminan sosial, antara lain :

a) **Bantuan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial**

Kabupaten Mukomuko memiliki tingkat intensitas dan frekuensi bencana yang tinggi karena letak geografis Kabupaten Mukomuko.

Berkenaan dengan permasalahan tersebut, penanggulangan bencana alam yang merupakan upaya kemanusiaan diberikan dalam rangka perlindungan dan penyelamatan untuk meminimalisasi jumlah korban dan mencegah terjadinya permasalahan sosial baru. Pemerintah Kabupaten Mukomuko melalui Dinas Sosial mempunyai tanggung jawab di bidang penanggulangan korban bencana alam secara fungsional, baik terhadap perorangan maupun kelompok masyarakat, dengan Membangun sistem dan mekanisme penanggulangan bencana secara terpadu :

- (1) Kesiapsiagaan, merupakan upaya untuk meminimalisasi jumlah korban bencana dan kerusakan sarana prasarana akibat bencana. Upaya ini dilaksanakan dalam bentuk penyediaan berupa bantuan darurat, peralatan evakuasi, dan mobilisasi kendaraan siaga bencana;
- (2) Tanggap darurat, merupakan upaya dalam rangka percepatan penanganan korban bencana dan mencegah terjadinya permasalahan sosial baru akibat bencana. Upaya ini dilakukan dalam bentuk aktivasi sistem penanggulangan bencana melalui upaya penyelamatan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan bantuan terapi psikososial;

- (3) Pascabencana, merupakan upaya yang dilaksanakan dalam rangka penguatan kondisi fisik dan psikososial korban bencana. Upaya ini dilaksanakan dalam bentuk rehabilitasi sosial secara fisik ataupun nonfisik melalui bantuan sosial dalam rangka penguatan kondisi psikososial korban bencana; dan
- (4) Penanggulangan bencana berbasis masyarakat dengan personel terlatih yang dinamakan Taruna Siaga Bencana (Tagana). Tagana telah turut mengambil bagian penting dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Mukomuko.

1.3. Kondisi Umum Pemberdayaan Sosial

Pemberdayaan Sosial merupakan salah satu dari empat intervensi kesejahteraan sosial yang diarahkan untuk mewujudkan warga masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dan tidak berdaya agar mereka mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Pemberdayaan sosial juga diarahkan agar seluruh sumber dan potensi kesejahteraan sosial yang ada pada masyarakat secara individu, keluarga, kelompok atau komunitas dapat digali dan akhirnya menjadi sumber kesejahteraan sosial yang dapat didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan. Lingkup sasaran pemberdayaan sosial adalah :

a) Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin

Sasaran kegiatan program pemberdayaan fakir miskin diarahkan pada : (i) keluarga fakir miskin yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai

mata pencaharian namun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar serta tinggal di daerah perdesaan/pertanian, perkotaan, pesisir/pantai, (ii) keluarga fakir miskin yang mengalami penurunan pendapatan dan kesejahteraannya secara sementara sebagai akibat dari perubahan kondisi normal menjadi kondisi kritis, seperti korban bencana alam, korban bencana sosial, terkena pemutusan hubungan kerja, dan masalah lainnya yang menyebabkan terhentinya penghasilan keluarga.

Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin meliputi : Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan. Kegiatannya dilaksanakan dalam bentuk bantuan pemberian fasilitas ekonomi atau bantuan modal usaha yang disalurkan kepada fakir miskin dengan pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

b) *Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat.*

Di bidang pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), ada beberapa pembangunan kesejahteraan sosial seperti karang taruna (KT), pekerja sosial masyarakat (PSM), organisasi sosial (orsos), dunia usaha, dan kelompok-kelompok sosial masyarakat dalam bentuk pelatihan manajemen pengelolaan dan

pengembangan UEP. Komponen kegiatan pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat :

- (1) Pemantapan Program Pemberdayaan Karang Taruna, Organisasi Sosial dan PSM
- (2) Orientasi dan Seleksi Karang Taruna, Orsos & PSM Berprestasi
- (3) Bimbingan Manajemen Organisasi Sosial
- (4) Penguatan Jaringan Kerja Orsos Melalui UEP

Pengembangan dan potensi sumber kesejahteraan sosial tidak hanya infrastruktur kesejahteraan sosial yang menjadi mitra dalam penanganan masalah sosial semata, tetapi juga terhadap nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial. Upaya penanganan diarahkan untuk tetap terpeliharanya nilai keteladanan dan jiwa kejuangan bagi kalangan generasi muda.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) adalah untuk mewujudkan akuntabilitas dan merupakan sarana untuk mengkomunikasikan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penyampaian Laporan Kinerja (LKJ) dimaksudkan untuk memberikan:

1. Pertanggungjawaban kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko kepada pemberi mandat/amanah.
2. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan kearah perbaikan dalam perencanaan selanjutnya dan Umpan balik untuk peningkatan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko.
3. Meningkatkan akuntabilitas.

4. Mengetahui dan menilai keberhasilan/kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas akan dapat dilaksanakan lebih efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

D. GAMBARAN UMUM

1.1. Organisasi Perangkat Daerah

Pemerintah Kabupaten Mukomuko melalui Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10) dan Peraturan Bupati Mukomuko Nomor : 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko, Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko terdiri :

2.1.1. Kepala Dinas

2.1.2. Sekretariat, terdiri dari :

2.1.2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2.1.2.2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

2.1.3. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial terdiri dari :

2.1.3.1. Seksi Rehabilitasi Sosial

2.1.3.2. Seksi Jaminan Sosial Keluarga

2.1.3.3. Seksi Perlindungan Sosial dan Korban Bencana

2.1.4. **Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin** terdiri dari :

- 2.1.4.1. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
- 2.1.4.2. Seksi Pendampingan, Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan; dan
- 2.1.4.3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan dan Restorasi Sosial

1.2 **Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia ini berkaitan dengan jumlah personil/ karyawan yang ada di Dinas Sosial pada tahun 2020. Jumlah karyawan yang ada saat ini dirasakan masih kurang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, terutama untuk mendukung kebijakan, program dan kegiatan yang memerlukan mobilitas dan akselerasi tinggi, baik yang bersifat konseptual maupun urusan teknis. Gambaran profil Aparatur Sipil Negara Dinas Sosial terlihat seperti pada **Tabel. 2**

1.3 **Sumber Daya Aparatur**

Pada tabel Sumber Daya Manusia tersebut diatas menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia di Dinas Sosial dapat dikatakan kurang baik dalam segi jumlah maupun pendidikan, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah yang menduduki eselon 12 orang sedang jumlah staf yang berstatus PNS berjumlah 8 orang sehingga tidak semua pejabat struktural memiliki seorang staf, namun demikian untuk mengatasi kekurangan tersebut Dinas Sosial mencari alternatif dengan mengangkat Tenaga Kontrak sejumlah 2 (dua) orang dan untuk peningkatan kemampuan operasional akan dikembangkan melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal guna lebih meningkatkan kemampuan Sumber Daya Aparatur.

Maka pada Dinas Sosial terdapat 4 (Empat) eselon yaitu Eselon II-B, III-A, III-B dan IV-A hal ini sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 Nomor 10) dan Peraturan Bupati Mukomuko Nomor : 37 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko dapat dilihat pada **Tabel. 3**

1.4 Sumber Pendanaan dan Struktur Belanja

Pada tahun 2020, Dinas Sosial mendapatkan alokasi dana/anggaran senilai **Rp.2.833.018.750,00** meliputi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Struktur Anggaran Dinas Sosial Tahun 2020 seperti terlihat pada **Tabel. 4**

1.5 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Sosial dalam Tahun Anggaran 2020, dengan bentuk sajian seperti berikut:

Bab I. Pendahuluan, menguraikan gambaran secara garis besar tentang Dinas Sosial dan tentang LAKIP, yang berisikan antara lain;

- a. Latar Belakang;
- b. Kedudukan, Tugas dan Fungsi;
- c. Struktur Organisasi. Sumber Pendanaan dan Struktur Belanja;
- d. Sistematika Penyajian.

Bab II. Menguraikan perencanaan dan penetapan kinerja serta program kerja Dinas Sosial dalam tahun anggaran 2020, meliputi

- a. Rencana Strategis; dan
- b. Penetapan Kinerja

Bab III. Akuntabilitas kinerja, menguraikan tentang capaian kinerja Dinas Sosial, meliputi:

- a. Pengukuran Kinerja
- b. Hasil Pengukuran Kinerja
- c. Akuntabilitas Keuangan

Bab IV. Penutup, menguraikan

- a. Catatan dari seluruh sajian laporan tentang kinerja (LAKIP)
- b. Upaya pemecahan masalah untuk peningkatan kinerja Dinas Sosial di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Tahun 2020 adalah Tahun Pertama dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial periode 2018-2021. Tahun ini merupakan bagian penting untuk menjalankan target-target yang termasuk dalam Renstra itu untuk dapat diwujudkan. Sehingga Renstra sebagai acuan untuk tahun ke tahun dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran organisasi dapat direalisasikan secara optimal untuk mendukung pembangunan daerah secara keseluruhan dan berkelanjutan.

1. Visi dan Misi

Visi atau *vision* adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh organisasi. Visi Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Tahun 2018-2021 adalah ***“Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kabupaten Mukomuko”***

Dalam upaya mewujudkan visi di atas, telah dirumuskan beberapa misi yang merupakan penjabaran yang lebih detail dari visi. Misi Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, Pelayanan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Jaminan kesejahteraan sosial bagi PMKS;
- b. Mengembangkan Perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS;
- c. Meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan perlindungan sosial dalam bentuk bantuan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan dan jaminan sosial sebagai metode penanggulangan kemiskinan;

- d. Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial untuk menjamin keberlanjutan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- e. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- f. Mengembangkan potensi sumber daya kawasan dan melaksanakan perpindahan penduduk untuk memenuhi kebutuhan perkembangan pemukiman transmigrasi yang berwawasan lingkungan;
- g. Pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi yang sejahtera untuk mendukung pembangunan daerah;
- h. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dan masyarakat transmigrasi;
- i. Mendorong perluasan kerja dan meningkatkan penempatan tenaga kerja;
- j. Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan bermartabat; dan
- k. Mewujudkan kepastian hukum dibidang ketenagakerjaan dan menciptakan suasana nyaman dan produktif.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi, pemecahan masalah (*problem solving*) dan upaya untuk merespon dan menangani isu-isu daerah yang aktual. Tujuan juga dapat dipahami sebagai implementasi dari pernyataan visi, dan merupakan hasil akhir yang akan dicapai oleh organisasi dalam waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang target pencapaiannya ditentukan setiap tahun. Penetapan secara akurat, terukur dan komprehensif tujuan dan sasaran pada akhirnya akan mempermudah pencapaian visi dan misi OPD. Tentu muara dari semua itu adalah tercapainya visi dan misi daerah yang merupakan formula dari visi dan misi kepala daerah yang disusun dengan berlandaskan dan mengacu pada RPJPD Daerah, RPJPD Provinsi maupun RPJPN. Gambaran mengenai tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 dapat dilihat pada **Tabel.5**

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 perlu dirumuskan program-program yang relevan. Program-program utama itu adalah sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Adiministrasi Perkantoran;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- d. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
- e. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
- f. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
- g. Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial
- h. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam upaya untuk mendukung realisasi program-program utama ditetapkan beberapa kegiatan yang berorientasi pada pencapaian tujuan bidang-bidang. Kegiatan yang mendukung

penyelenggaraan fungsi kesekretariatan dan keuangan berorientasi pada upaya penguatan internal dan eksternal OPD, baik dari sisi administratif maupun kinerja aparatur secara keseluruhan. Kegiatan yang mendukung fungsi bidang sosial itu berorientasi pada pelayanan, perlindungan, pemberdayaan dan peningkatan kapasitas (*capacity building*) PMKS/PSKS, baik yang fokus pada seting mikro, mezzo maupun makro.

4. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam Renstra. Adapun indikator kinerja utama Dinas Sosial Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko dapat dilihat pada Tabel 1.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko, sebagai berikut :

Tabel 1.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Tahun 2020

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi	Sumber Data
1.	Meningkatnya Keberdayaan PMKS	Terpenuhinya pelayanan dasar penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang terpenuhi pelayanan kebutuhan dasarnya	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang terlayani}}{100 \text{ Jumlah PMKS}}$	Report database PMKS

		Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terlayani meningkat	Persentase kenaikan PMKS yang terpenuhi pelayanan kebutuhan dasarnya	Jumlah PMKS yang terlayani tahun berjalan (n) dikurangi jumlah PMKS yang terlayani tahun sebelumnya (n-1) dibagi jumlah PMKS tahun dikalikan 100% berjalan	Report database PMKS
--	--	---	--	--	----------------------

B. Penetapan Kinerja Tahun 2020

Rencana Target Kinerja tahun 2020 dengan indikator dan target capaiannya secara rinci dapat dilihat dalam **Tabel.7**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program dan Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar 17 macam PMKS	Persentase 17 macam PMKS yang terpenuhi pelayanan kebutuhan dasarnya	72,13 %	<p>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Sosial bagi orang terlantar tidak dikenal 2. Penyelenggaraan distribusi Buffer Stock 3. Bantuan Penyandang Cacat Berat 4. Perlindungan Sosial anak 5. Penanganan Masalah-masalah Strategis yang menyangkut Tanggap Darurat dan Kejadian Luar Biasa <p>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) dan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Keluarga Harapan 2. Penyuluhan Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas, dan pendamping Sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya 3. Pelatihan ketrampilan bagi penyandang cacat 4. Sesi pembangunan keluarga (family Development) 5. Verifikasi dan Validasi data Kemiskinan 6. Penyaluran bantuan pangan Non Tunai (BPNT) Kesejahteraan Keluarga <p>Program Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kapasitas (Capacity Building) 2. Pendidikan dan Pelatihan bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan 3. Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional

				<p>Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)2. Pembinaan Program Asistensi sosial Lanjut Usia terlantar3. Pembinaan Program Asistensi sosial Cacat Berat

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok *input*, *outputs*, *outcomes*, *benefits* dan *impacts*. Menentukan satuan setiap kelompok indikator, menetapkan rencana tingkat capaian (*target*), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan, menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan persentasenya.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara idealitas dan realitas. Artinya perbandingan itu dilihat dari target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja dengan realisasinya.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang kurang baik, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Rencana}) \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.

Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Kemudian nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

$X > 85$: Sangat Berhasil
$70 < X < 85$: Berhasil
$55 < X < 70$: Cukup Berhasil
$X < 55$: Tidak Berhasil

B. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih difokuskan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun *stakeholder* lainnya. Tentu dalam prosesnya indikator kinerja yang digunakan akan ditetapkan secara mandiri.

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Tahun 2020. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran dan hasil. Hasil pengukuran kinerja secara rinci dan lengkap diuraikan dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari LAKIP Dinas Sosial Tahun 2020.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mukomuko Tahun 2020.

Pada tahun 2020 belanja Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung di laksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya

dan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 Nomor 4). Gambaran anggaran Dinas Sosial tahun 2020 dibagi menjadi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung diuraikan pada **Tabel 8 dan 9**.

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung atau sering dikenal dengan belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko menganggarkan belanja tidak langsung sebesar **Rp.1.704.319.000,00-** sedangkan realisasinya sebesar **Rp. 1.556.243.163,00-** atau **91,31 %** yang secara rinci dapat dilihat pada **Tabel. 8**

2. Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang mana dana tersebut merupakan sebagai salah satu unsur yang sangat penting dalam mencapai sasaran pembangunan. Pada Tahun 2020 Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko menganggarkan belanja langsung sebesar **Rp. 1.128.699.750,00-** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 1.005.192.056,00-** atau **89.06 %** Gambaran secara rinci terkait penganggaran dan realisasi belanja langsung Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko per-program dan per-kegiatan Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada **Tabel. 9**

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN DAN SOLUSI

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa Indikator Kinerja yang mengalami keberhasilan ataupun kegagalan. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab antara lain:

1. Cakupan atau jangkauan pelayanan program kesejahteraan sosial yang masih sangat terbatas
2. Terbatasnya sumber daya manusia sebagai pelaksana kegiatan
3. Belum optimalnya dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan dan masih lemahnya koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level.

Dalam rangka meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Mukomuko telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

Untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut di atas diperlukan upaya - upaya penanggulangan antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS dengan cara mendukung peningkatan pengelolaan program kesejahteraan sosial, peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM kesejahteraan sosial, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, seminar dan semacamnya
3. mengoptimalkan kualitas pelayanan dan meningkatkan koordinasi pada berbagai sektor dan level serta mencari dukungan program / kegiatan dari pemerintah Provinsi dan Pusat

Selain hal tersebut diatas perlunya rentang kendali terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan kegiatan yang efektif, inovatif, adaptif. Sinergi implementasi penyusunan

perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan, serta rentang kendali pelaksanaan tugas dari setiap level jabatan untuk memastikan sistem dan prosedur pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan dengan koordinasi yang efektif. Pengarahan atau direktif pimpinan unit kerja untuk penekanan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dilaksanakan dengan menjalin komunikasi dua arah melalui rapat staf rutin dan berkala agar setiap pejabat atau staf pelaksana dapat secara optimal melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara efektif, saling menggerakkan, berproduktif, serta dapat berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan dan perubahan peraturan yang ada.

Dalam hal pencapaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko tersebut, program / kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah semua Program dan Kegiatan yang berkaitan dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), antara lain :

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3. Program Pembinaan Anak Terlantar
4. Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Eks Trauma
5. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Hal tersebut dikarenakan program / kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat.

BAB IV PENUTUP

A. Beberapa Catatan Atas Kinerja Dinas Sosial Tahun Anggaran 2020

Setelah menilai dan menelaah laporan keuangan dan memperhatikan pencapaian kinerja dari program/kegiatan pada Tahun Anggaran 2020, maka terdapat beberapa catatan-catatan atas kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko yang diuraikan seperti di bawah ini:

1. Output Kegiatan

Berdasarkan kajian dan reviu terhadap pelaksanaan kegiatan tahun 2020, ada beberapa kegiatan yang pencapaian *output* belum terlalu menggembirakan. Terutama menyangkut ketersediaan data-data dan dokumen yang dihasilkan dari kegiatan tersebut. Indikator Output kegiatan yang masih terlalu luas, sehingga akan mengalami kesulitan tatkala akan menghitung dan mengukur kinerja secara rinci dan terukur.

2. Serapan Anggaran Kegiatan

Data realisasi keuangan menunjukkan bahwa masih terdapat kegiatan yang serapan anggarannya di bawah 95%. Permasalahan ini sesungguhnya tidak perlu terjadi apabila pengelola kegiatan dapat mengukur rencana target kinerja yang akan dicapai pada saat menyusun anggaran. Kesalahan juga bisa terjadi pada saat eksekusi kegiatan, yang tidak terkoordinasikan secara baik dan sistematis.

3. Akomodasi Anggaran Terhadap Perencanaan Kegiatan

Pencapaian target-target OPD secara keseluruhan juga terkendala oleh dukungan dana dari TAPD yang dirasakan masih kurang. Ada beberapa kegiatan yang diusulkan, terutama yang bersifat dana dampingan untuk pembiayaan program dari pemerintah pusat dan provinsi tidak terakomodir dalam Struktur Anggaran Dinas Sosial, Tahun Anggaran 2020.

Saat ini Dinas Sosial sangat membutuhkan rehab berat diantaranya meliputi beberapa bagian lantai kantor turun dan pecah, atap kantor bocor dan plafon banyak yang hancur.

4. Inovasi dan Kreatifitas Penyusunan Kegiatan

Permasalahan pada saat penyusunan kegiatan untuk mendukung pencapaian visi dan misi dinas juga terjadi dalam bentuk kegiatan yang diusulkan masih serupa atau memiliki kesamaan bentuk dengan kegiatan pada tahun sebelumnya. Sehingga pada beberapa fokus sasaran dirasakan begitu optimal, tetapi pada sasaran lainnya dirasakan progresnya masih sangat lemah. Sehingga apabila ini dibiarkan akan mengganggu pencapaian kinerja OPD secara khusus dan pencapaian target perencanaan pembangunan daerah secara umum.

5. Dukungan Personil/Karyawan

Kinerja Dinas Sosial pada tahun 2020 juga dipengaruhi oleh keterbatasan kuantitas dan kualitas karyawan/personil. Kekurangan itu tentu akan mempengaruhi akselerasi pencapaian target anggaran berbasis kinerja, terutama untuk dukungan tenaga teknis dilapangan.

B. Upaya Pemecahan Masalah

Terhadap beberapa catatan atas kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2020, dapat diusulkan beberapa rekomendasi upaya pemecahan masalah, yakni sebagai berikut:

1. Optimalisasi Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pada tahun 2020 yang baik dan memuaskan harus senantiasa dipertahankan dan ditingkatkan. Terhadap kegiatan yang belum optimal harus ada perbaikan mulai dari perencanaan sampai ke eksekusi kegiatan, terutama dalam koordinasi dan konsolidasi tim dalam pelaksanaannya. Pembagian beban kerja harus sudah jelas sebelum kegiatan dimulai "(siapa dan mengerjakan apa)".

2. Meningkatkan kualitas pendataan dan analisis pembangunan untuk mendukung kualitas perencanaan

Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja OPD harus dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia. Kualitas data sebagai sumber perencanaan juga sangat penting untuk diperhatikan. Agar perencanaan kegiatan yang telah disusun itu benar-benar dapat menunjang pencapaian visi dan misi OPD. Koordinasi dan konsultasi diantara bidang-bidang dengan subbag bina program dan kasi anggaran sebagai penanggungjawab urusan perencanaan harus baik, sehingga perencanaan kegiatan benar-benar dapat menjawab kebutuhan OPD.

3. Alternatif Dukungan Pendanaan dari CSR

Setelah melalui pembahasan yang cukup alot dan panjang Peraturan Daerah tentang tanggung jawab sosial perusahaan telah disahkan pada tahun 2020. Ini menjadi alternatif solusi terhadap persoalan minimnya alokasi anggaran pada Dinas Sosial untuk tahun berikutnya. OPD setidaknya sudah memiliki sandaran hukum untuk mencari sumber pendanaan diluar APBN dan APBD untuk membiayai kegiatan yang dibebankan, terutama untuk penanganan PMKS, Pemberdayaan PSKS, dan penanganan sektor ketenagakerjaan.

4. Mengupayakan penerapan "reward dan punishment" secara proporsional dan Profesional

Untuk menumbuhkan dan memotivasi karyawan dalam bekerja perlu diterapkan pemberian "reward dan punishment" secara proporsional. Tentu hal ini bukan hanya Dinas Sosial yang memikirkannya, tetapi sudah waktunya TAPD melakukan terobosan anggaran agar kinerja karyawan itu bisa ditingkatkan.

5. Peningkatan Produktifitas Layanan Sosial

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun 2020 tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan, maka diperlukan peningkatan produktifitas pada layanan sosial diantaranya sebagai berikut;

1. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana penunjang dalam melakukan pelayanan dibidang Sosial
2. Peningkatan pelayanan dan perlindungan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
3. Peningkatan kemandirian penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

**LAMPIRAN TABEL
LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA PEMERINTAH
DINAS SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2020**



STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL

KEPALA DINAS
S A R O N I, SH
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19641215 198903 1 004

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIS
AGUS HARVINDA, ST., M.SI
Pembina TK I IV/b
NIP.19710809 200312 1 002

SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
NETTI MIZANLATI, SE
NIP. 19760510 200604 2 007

SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
RAPLIADI, S.AP
NIP. 19821103 200701 1 003

BIDANG
REHABILITAS DAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL
MUH.SANUSI, SH
NIP. 19700912 199303 1 005

BIDANG
PEMBERDAYAAN DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN
RABIADI, SE
NIP. 19780312 200604 1 008

SEKSI REHABILITAS SOSIAL
FARIDA SANDRIANI, SS
NIP. 19770206 201001 2 001

SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENGUATAN KAPASITAS
CHRISTINA DAMAYANTI, S.Sos
NIP. 19860311 201101 2 010

SEKSI JAMINAN SOSIAL KELUARGA
ELLY SUSBENTI, S.Sos
NIP. 19710727 201101 2 003

SEKSI PENDAMPINGAN, BANTUAN STIMULAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN
HARTOYO
NIP. 19650430 198701 1 001

SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA
HERMAWATI
NIP. 19641207 198602 2 002

SEKSI PEMBERDY, MASYARAKAT, KELEMBAGAAN DAN RESTORASI SOSIAL
J.MARYA SARI, AMd
NIP. 19830519 200604 2 005

UPT

KEPALA DINAS

S A R O N I, SH
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19641215 198903 1 004

TABEL 2

**PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA DINAS SOSIAL TAHUN 2020
BERDASARKAN KEPANGKATAN DAN PENDIDIKAN**

GOL.	PENDIDIKAN					JUMLAH
	S2	S1	SM/D3	SLTA	SLTP	
IV/c		1				1
IV/b	1					1
IV/a						
III/d		3		2		5
III/c		4				4
III/b		1	1			3
III/a		1	1			2
II/d				2		2
II/c						
II/b						
II/a						
Kontrak		2				2
TKS		7		7		14
Jumlah	1	19	2	11		36

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

TABEL. 3
SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN ESELON

NO.	JABATAN	GOL.	ESELON	STAF	JUMLAH
1	Kepala Dinas Sosial	IV/c	II/b		1
2	Sekretaris	IV/a	III/a		1
3	Kepala Bidang	III/d	III/b		2
4	Kepala Sub Bagian	III/d, III/c	IV/a		2
5	Kasi	III/d, III/d, III/c, III/c, III/b	IV/a	5	6
J U M L A H				5	12

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

TABEL. 4
STRUKTUR ANGGARAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN MUKOMUKO
TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	PROGRAM	PAGU ANGGARAN
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.704.319.000,00
1.	Belanja Pegawai	1.704.319.000,00
B.	BELANJA LANGSUNG	1.128.699.750,00
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	478.954.250,00
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	57.900.000,00
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	17.000.000,00
4.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya	370.258.000,00
5.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	98.087.500,00
7.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	60.500.000,00
8.	Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	30.000.000,00
10.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	15.000.000,00

Sumber : Sub.Bagian Perencanaan dan Keuangan

**TABEL 5.
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS SOSIAL TAHUN 2020**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1.	Terwujudnya Aksesibilitas Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Pemberdayaan dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar Serta Terjaminnya Kesejahteraan Sosial PMKS	Jumlah PMKS sudah tertangani
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan perlindungan sosial sebagai metode pengkulangan kemiskinan	Meningkanya mutu keterjangkauan dan profesionalitas penyelenggaraan perlindungan sosial dalam upaya penanggulangan kemiskinan	Penanggulangan kemiskinan yang bermutu terjangkau dan profesional
3.	Terwujudnya Peran Aktif PSKS dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	Meningkatnya Potensi dan Sumber Kesejahteraan (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS	Potensi dan Sumber Kesejahteraan (PSKS) dan Jumlah PMKS yang tertangani dengan baik
4.	Terwujudnya Jiwa Keperintisan Kesetiakawanan Sosial dan Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan	Perintis Kemerdekaan Veteran, Janda Pahlawan dan Keluarga yang mendapatkan layanan kesejahteraan sosial	Jumlah Perintis Kemerdekaan, Veteran, janda pahlawan dan keluarga yang mendapatkan layanan kesejahteraan sosial
5	Terwujudnya Akses ruang partisipasi dan Pemahaman akan resiko bencana serta cara penanggulangan melalui Peranaktif dan keterlibatan seluruh komponen	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanganan korban bencana	Jumlah Partisipasi dan penanganan bencana yang sudah ditangani dengan baik

Sumber: Renstra Dinas Sosial Tahun 2017-2021

TABEL. 7
EVALUASI ANALISIS KINERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN MUKOMUKO
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NO. REKENING	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	PAGU	REALISASI PAGU	REALISASI TARGET
1	4	4	4	5		6	6	6	6
I	1.06.06.01.01	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur birokrasi yang prima dan memuaskan masyarakat	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan Kualitas Manajemen Pemerintah Daerah		1.200 Lembar, 12 bulan, 35 orang, 51 Jenis, 1 Paket, 120 Kali	478.954.250	423.827.756	88,49%
1	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input	Jumlah Dana	3.000.000	3.000.000	2.880.000	96,00%
				Output	Jumlah Penyediaan jasa surat menyurat	610 Lembar, 1 kali			
				Outcome	Realisasi Penyediaan Jasa Surat Menyurat	610 Lembar, 1 kali			
2	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input	Jumlah dana	29.000.000	29.000.000	19.644.256	67,74%
				Output	Jangka Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan			
				Outcome	Belanja Telpon, Belanja Listrik, Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV/kabel/TV satelit	12 Bulan			
3	07		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input	Jumlah Dana	99.900.000	99.900.000	74.925.000	75,00%
				Output	Jumlah Penerima jasa administrasi keuangan	16 Orang			
				Outcome	Realisasi penyediaan jasa administrasi keuangan	7 Orang Pengelola Keuangan, 4 Orang Pengelola Unit Aplikasi SIMDA Keuangan, 4 Orang Pengelola SIMDA Perencanaan, 1 Orang Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa			
4	08		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input	Jumlah Dana	48.000.000	48.000.000	48.000.000	100,00%
				Output	Jumlah Penerima jasa kebersihan kantor	4 orang			
				Outcome	Cleaning Service	4 orang			
5	10		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input	Jumlah Dana	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100,00%
				Output	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	21 Jenis			
				Outcome	Realisasi Penyediaan Alat Tulis Kantor	506 Rim/Pcs/Pak/Kotak/Botol			

NO	NO. REKENING	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	PAGU	REALISASI PAGU	REALISASI TARGET
						6	6	6	6
6	11		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input	Jumlah Dana	12.000.000	12.000.000	11.945.000	99,54%
				Output	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Jenis			
				Outcome	Realisasi Penyediaan Barang Cetak dan Realisasi Penyediaan Barang Penggandaan	40 Buku/10 Pak/21050 Lembar			
7	12		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input	Jumlah Dana	15.189.000	15.189.000	15.183.500	99,96%
				Output	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	7 Jenis/ Paket			
				Outcome	Realisasi Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	251 buah/ meter			
8	13		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input	Jumlah Dana	7.500.000	7.500.000	7.494.000	99,92%
				Output	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13 Jenis			
				Outcome	Realisasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	178 Buah			
9	15		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Input	Jumlah Dana	19.680.000	19.680.000	19.650.000	99,85%
				Output	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3 Jenis			
				Outcome	Realisasi Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	13 Media			
10	17		Penyediaan Makanan dan Minuman	Input	Jumlah Dana	20.000.000	20.000.000	19.990.000	99,95%
				Output	Jumlah Penyediaan makanan dan minuman	8 Jenis			
				Outcome	Realisasi Penyediaan makanan dan minuman	784 Kotal/Dus/Krat/bungkus/kg/ pak/kaleng			
11	18		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Input	Jumlah Dana	46.845.250	46.845.250	46.821.000	99,95%
				Output	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Kali			
				Outcome	Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Eselon II 4 Kali, Eselon III 1 Kali, Eselon IV/Golongan IV 4 Kali, Golongan III 1 Kali, Golongan I dan II 2 Kali			
12	19		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Input	Jumlah Dana	12.840.000	12.840.000	12.795.000	99,65%
				Output	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	59 Kali			
				Outcome	Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	12 Kali eselon II, 14 Kali Eselon III, 10 Kali Eselon IV/Golongan IV 10 Kali Golongan III, 13 Kali Golongan I dan II, 50 Liter BBM			

NO	NO. REKENING	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	PAGU	REALISASI PAGU	REALISASI TARGET
13	21		Penyediaan Jasa Kantor	Input	Jumlah Dana	150.000.000	150.000.000	129.500.000	86,33%
				Output	Jumlah penerima jasa kantor	15 Orang			
				Outcome	Realisasi penyediaan jasa kantor	4 Orang Pengelola TEPRA, 2 Orang Tenaga Honor Daerah, 2 Orang Sopir, 2 Orang Pramusaji, 1 Orang Pramutaman, 2 Orang Penjaga Malam, 3 Orang Tenaga Arsiparis			
II	1.06.06.01.02	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur birokrasi yang prima dan memuaskan masyarakat	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik		100%	57.900.000	57.044.000	98,52%
1	09		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Input	Jumlah Dana	14.000.000	14.000.000	14.000.000	100,00%
				Output	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	2 Jenis			
				Outcome	Laptop dan Printer	1 Unit PC, 1 Unit Printer			
2	24		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input	Jumlah Dana	43.900.000	43.900.000	43.044.000	98,05%
				Output	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	3 Jenis			
				Outcome	Kendaraan bermotor roda 6, Kendaraan bermotor roda 4, Kendaraan bermotor roda 2	2 Unit Kendaraan roda 6, 4 Unit Kendaraan roda 4 dan 9 Unit Kendaraan Roda 2			
III	1.06.06.01.01	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan Daerah	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		20 Unit, 5 Jenis	17.000.000	16.980.000	99,88%
1	09		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Input	Jumlah Dana	7.000.000	7.000.000	7.000.000	100,00%
				Output	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen			
				Outcome	Jumlah buku laporan Keuangan Akhir tahun	5 Buku			
2	01		Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja	Input	Jumlah Dana	10.000.000	10.000.000	9.980.000	99,80%
				Output	Jumlah dokumen Laporan Kinerja dan Perjanjian Kerja	2 Dokumen			
				Outcome	Jumlah buku laporan kinerja dan perjanjian kinerja	10 Buku			

NO	NO. REKENING	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	PAGU	REALISASI PAGU	REALISASI TARGET
1	4	4	4	5		6	6	6	6
IV	1.06.06.01.16	Meningkatnya Penanganan Korban Bencana	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang dibina, direhab dan dilayani (Orang)		8,19%	99.087.500	98.162.500	99,07%
1	14		Pelayanan Sosial bagi orang terlantar dan orang tidak dikenal	Input	Jumlah Dana	52.250.000	52.250.000	51.825.000	99,19%
				Output	Jumlah orang terlantar dan orang tidak dikenal yang mendapatkan pelayanan sosial	30 Orang			
				Outcome	Jumlah dokumen pelayanan sosial terhadap orang terlantar dan orang tidak dikenal	30 Orang			
2			Penyelenggaraan Distribusi Buffer Stock	Input	Jumlah Dana	46.837.500	46.837.500	46.337.500	98,93
				Output	Jumlah Penerima Bantuan selama masa tanggap darurat	200 Orang			
				Outcome	Realisasi Bantuan Stock bagi korban Bencana Sosial dan Bencana alam	200 Orang			
V	1.06.06.01.21	Meningkatnya mutu keterjangkauan dan profesionalitas penyelenggaraan perlindungan sosial dalam upaya penanggulangan kemiskinan	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase warga masyarakat yang menjadi dan berpartisipasi dalam usaha pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat		100%	60.500.000	60.500.000	100,00%
1	10		Pendampingan Sistem Pelayanan Terpadu	Input	Jumlah Dana	60.500.000	60.500.000	60.500.000	100,00%
				Output	Jumlah Pengembangan SLRT dalam usaha pembangunan	4 Kali			
				Outcome	Jumlah sumber potensi masyarakat yang diberdayakan dalam usaha pengembangan SLRT	26 SPU/Puskesmas/BO/Pasilitator			
VI	1.06.06.01.22	Meningkatnya Potensi dan Sumber Kesejahteraan (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Jumlah partisipasi masyarakat dalam penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)		100%	370.258.000	295.018.000	79,68%
1	01		Peningkatan Kapasitas Pendamping dan Operator Program Keluarga Harapan	Input	Jumlah Dana	70.000.000	70.000.000	60.880.000	86,97%
				Output	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan kapasitas pendamping dan operator program keluarga harapan	8 Kali			
				Outcome	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan terhadap Kelompok Penerima Program Keluarga Harapan	12 Bulan			

NO	NO. REKENING	BASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	PAGU	REALISASI PAGU	REALISASI TARGET
						6	6	6	6
2	09		Sesi Pembangunan Keluarga (Family Development Session)	Input	Jumlah Dana	12.000.000	12.000.000	12.000.000	100,00%
				Output	Jumlah Peserta Sesi Pembangunan Keluarga (Family Development Session)	504 KPM			
				Outcome	Jumlah KPM yang menerima manfaat dari sesi Pembangunan Keluarga	504 KPM			
3	10		Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan	Input	Jumlah Dana	106.250.000	106.250.000	85.100.000	80,09%
				Output	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Verifikasi Data Kemiskinan	2 Kali			
				Outcome	Jumlah Dokumen Data Kemiskinan	1 Dokumen			
4	10		Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kesejahteraan Keluarga	Input	Jumlah Dana	88.400.000	88.400.000	43.430.000	49,13%
				Output	Jumlah Penyaluran Bantuan Sosial Pangan Non Tunai (BPNT)	9.221 RT-SPM			
				Outcome	Jumlah Penerima bantuan sosial Pangan	9.221 RT-SPM			
5	18		Revitalisasi dan Pengadaan Perangkat Pengolah Data Pusat Layanan Data Sosial	Input	Jumlah Dana	93.608.000	93.608.000	93.608.000	100,00%
				Output	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Pusat Layanan Data	6 Jenis			
				Outcome	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pusat Layanan Data	11 Unit/ Paket			
VII	1.06.06.01.24	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur dengan Layanan Pemenuhan Hak-hak Dasar Masyarakat miskin tanpa membedakan Suku, Agama dan Golongan	Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	Persentase Kepala Keluarga miskin yang diberdayakan (KK)		100%	30.000.000	29.989.300	99,96%
1	02		Pendampingan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Input	Jumlah Dana	30.000.000	30.000.000	29.989.300	99,96%
				Output	Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	80 KUBE			
				Outcome	Jumlah dokumen pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	80 KUBE			
VIII	1.06.06.01.21	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase penyusunan Renstra, Renja dan Renja Perubahan Tepat Waktu		100,00%	15.000.000	14.670.000	97,80%

NO	NO. REKENING	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	PAGU	REALISASI PAGU	REALISASI TARGET
						6	6	6	6
1	15		Penyusunan Renstra, Renja dan Renja Perubahan	Input	Jumlah Dana	15.000.000	15.000.000	14.670.000	97,80%
				Output	Jumlah dokumen penyusunan renstra, renja, dan renja perubahan	2 Dokumen			
				Outcome	Jumlah buku renstra, renja dan renja perubahan	4 Buku			

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Mukomuko, 2020
Kepala Dinas Sosial



SARONG SH
NIP. 196412151989031004

TABEL 9
PAGU REALISASI BELANJA LANGSUNG
DINAS SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Program/ Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	REALISASI TARGET	PAGU	REALISASI PAGU	KET.
	BELANJA						
	Belanja Langsung		1.128.699.750	89,06	1.128.699.750	1.005.192.056	
A.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan Kualitas Manajemen Pemerintah Daerah	1.200 Lembar, 12 bulan, 35 orang, 51 Jenis, 1 Paket, 120 Kali	88,49	478.954.250	423.828.256	
	1. Penyediaan jasa surat menyurat		3.000.000	96,00	3.000.000	2.880.000	
	2. Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik		29.000.000	67,74	29.000.000	19.644.256	
	3. Penyediaan jasa administrasi keuangan		99.900.000	75,00	99.900.000	74.925.000	
	4. Penyediaan jasa kebersihan kantor		48.000.000	100,00	48.000.000	48.000.000	
	5. Penyediaan Alat Tulis Kantor		15.000.000	100,00	15.000.000	15.000.000	
	6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		12.000.000	99,54	12.000.000	11.945.000	
	7. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor		15.189.000	99,96	15.189.000	15.183.500	
	8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		7.500.000	99,92	7.500.000	7.494.000	
	9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per-UU-an		19.680.000	99,85	19.680.000	19.650.000	
	10. Penyediaan makanan dan minuman		20.000.000	99,95	20.000.000	19.990.500	
	11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		46.845.250	99,95	46.845.250	46.821.000	
	12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah		12.840.000	99,65	12.840.000	12.795.000	
	13. Penyediaan Jasa Kantor		150.000.000	86,33	150.000.000	129.500.000	
B.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	20 Unit, 5 Jenis	98,52	57.900.000	57.044.000	
	1. Pengadaan peralatan gedung kantor		14.000.000	100,00	14.000.000	14.000.000	
	2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		43.900.000	98,05	43.900.000	43.044.000	

No.	Program/ Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	REALISASI TARGET	PAGU	REALISASI PAGU	KET.
C.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	3 Dokumen	99,88	17.000.000	16.980.000	
	1. Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun		7.000.000	100,00	7.000.000	7.000.000	
	2. Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja		10.000.000	100,00	10.000.000	9.980.000	
D.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Jumlah partisipasi masyarakat dalam penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	72,13%	82,11	370.258.000	304.018.000	
	1. Peningkatan Kapasitas Pendamping dan Operator Program Keluarga Harapan		70.000.000	99,83	70.000.000	69.880.000	
	2. Sesi Pembangunan Keluarga (Family Development Session)		12.000.000	100,00	12.000.000	12.000.000	
	3. Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan		106.250.000	80,09	106.250.000	85.100.000	
	4 Penyaluran Pangan Non Tunai (BPNT) Kesejahteraan Keluarga		88.400.000	49,13	88.400.000	43.430.000	
	5. Revitalisasi dan Pengadaan Perangkat Pengolah Data Pusat Layanan Data Sosial		93.608.000	100,00	93.608.000	93.608.000	
E.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang dibina, direhab dan dilayani (Orang)	8,19%	99,07	99.087.500	98.162.500	
	1. Pelayanan Sosial bagi orang terlantar dan orang tidak dikenal		52.250.000	99,19	52.250.000	51.825.000	
	2. Penyelenggaraan distribusi buffer stock		46.837.500	92,54	46.837.500	46.337.500	
F.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase warga masyarakat yang menjadi dan berpartisipasi dalam usaha pembangunan kesejahteraan Sosial masyarakat	1,10%	100,00	60.500.000	60.500.000	
	1. Pendampingan Sistem Pelayanan Terpadu		60.500.000	100,00	60.500.000	60.500.000	
G.	Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	Persentase Kepala Keluarga miskin yang diberdayakan (KK)	9,83%	99,96	30.000.000	29.989.300	

No.	Program/ Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	REALISASI TARGET	PAGU	REALISASI PAGU	KET.
	1. Pendampingan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)		30.000.000	99,96	30.000.000	29.989.300	
H.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	97,80	15.000.000	14.670.000	
	1. Penyusunan Renstra, Renja dan Renja Perubahan		15.000.000	100,00	15.000.000	14.670.000	

Mukomuko,
Kepala Dinas Sosial



SARONI.SH
NIP. 196412151989031004